

RENCANA KERJA RENCANA KERJA

TAHUN 2026



PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, September 2025
Inspektur Daerah Kota Batam



Hendriana Gustini, S.Sos, CGCAE
NIP.19680824 199009 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	16
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	16
2.3.3 Peluang dan Tantangan	17
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	36
BAB V PENUTUP	52
5.1 Catatan Penting	52
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	52
5.3 Rencana Tindak Lanjut	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Batam	15
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Daerah Kota Batam	20
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam	26
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2026	30
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana Pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pengawasan urusan pemerintahan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Inspektorat Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau:4,18/2025);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 19 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1539);

11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1546);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1), tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2026 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Revisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Batam mengacu pada Renstra periode 2025 -2029 sebagaimana Tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Dari 3 program yang sudah direncanakan, tidak ada satu program pun yang tidak mencapai target.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan, dari target fisik yaitu 89% mencapai 89%.
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - a) Kegiatan Asistensi dan Pendampingan dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Dari 3 program yang sudah direncanakan, tidak ada satu program pun yang melebihi target/keluaran yang direncanakan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Urusan : Urusan Pengawasan									
	Bidang Urusan:									
	Program : Punjung Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP PD	76,89					-	-	-
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	93,50 100%					-	-	-
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen					-	-	-
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen					-	-	-
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%					100%	50%	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Cupaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan					99 Orang/bulan	88 Orang/Bulan	100%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen					12 Dokumen	6 Dokumen	50%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya	100%							
	Sub Kegiatan : Pengadaan Paksi Dinas Peserta Atribut Kelengkapan Kelengkapannya	Jumlah Paket Paksi Dinas Peserta Atribut Kelengkapan	1 Paket							
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang					88 Orang	24 Orang	37,27%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%					100%	64,17%	64,17%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket					1 Paket	0 Paket	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Output) (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Hasil Keluaran Kegiatan s/d 4 Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5/7+9)	10=(10/4)	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	5 Paket					5 Paket	3 Paket	60%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengerahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengerahan yang Disediakan	1 Paket					1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket					4 Paket	3 Paket	75%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%					100%	85%	85%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit					6 Unit	3 Unit	50%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit					127 Unit	51 unit	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-11	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Reanginas) Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	5 Unit	3	0	7	0	9	10-11-12-13-14	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%	100%	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	
	Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%					100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	10-15-7+9	11-10/4	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Persewaan Dinas aron kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajalnya	1 Unit				1 Unit	1 Unit	50%	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajalan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pajalnya	8 Unit				8 Unit	8 unit	31%	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit				55 Unit	24 unit	40,61%	
	Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	100%				-	-	-	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1	100%				-	-	-	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%				-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	10=(5+7+9)	11=(10/9)	
	Sub kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan				12 Laporan	2 Laporan	18,18%	
	Sub kegiatan : Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah	1 Laporan				1 Laporan	0 Laporan	0%	
	Sub kegiatan : Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Kinerja	30 Laporan				19 Laporan	12 Laporan	63,16%	
	Sub kegiatan : Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	2 Laporan				22 Laporan	1 Laporan	100%	
	Sub kegiatan : Kinerja Pengawasan Internal	Jumlah Kecepatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100%	
	Sub kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ATP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ATP	2 Dokumen				2 Dokumen	1 Dokumen	50%	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu M-1	100%				-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	4	5	6	7	9	10 (3-7+3)	11 (10/4)	
	Sub Kegiatan : Penanganan Penyelidikan Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan				2 Laporan	1 Laporan	50%	
	Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan				2 Laporan	1 Laporan	50%	
	Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko	100%				-	-	-	
		Persentase pemenuhan pilar IEPPK	100%				-	-	-	
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan yang ditetapkan	100%				-	-	-	
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 Rekomendasi				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Rekomendasi				1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan [Renja Perangkat Daerah] Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	3	3	4	5	5	5	9	10	11	10/4
	Kegiatan : Asistensi dan Pendampingan	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100%							
	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah				43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 Perangkat Daerah				43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan				2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Puncak Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Puncak Integritas	17 Perangkat Daerah				17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Indikator kinerja kunci Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Batam

No	Indikator	STM/ Standar Nasional	IKK	Target Rencana Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)			
1.	Tingkat Mutuas SIP		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	n.a	Level 3	Level 3	Level 3	n.a			
2.	Persentase SKTD dengan SAKIP mencapai nilai 100 dari Hasil Evaluasi Inspektorat		90%	93%	100%	n.a	86%	93%	100%	n.a				
3.	Nilai Kapabilitas APIP		Level 3	Level 3	Level 3	n.a	Level 3	Level 3	Level 3	n.a				
4.	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi		83%	84%	85%	n.a	83%	84%	85%	n.a				
5.	Persentase SKPI yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) mendapat nilai B		84%	91%	100%	n.a	84%	91%	100%	n.a				
..	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan		83.60%	83.80%	84.00%	n.a	83.60%	83.80%	84.00%	n.a				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Belum optimalnya penerapan SPIP pada perangkat daerah;
2. Belum optimalnya peningkatan Kapasitas APIP;
3. Belum optimalnya peralatan kerja teknis;
4. Belum optimalnya penugasan tim pembinaan dan pengawasan yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kompetensinya;
5. Belum adanya standar tentang jangka waktu pelaksanaan dan pembinaan pengawasan secara rinci.

B. Permasalahan Eksternal

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan mandat tugas dari instansi vertikal yang banyak dan wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada perangkat daerah;
4. Belum optimalnya penerapan Manajemen Risiko pada perangkat daerah;
5. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan pada perangkat daerah.

Analisis terhadap lingkungan internal Inspektorat Dacrah memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Terdapatnya dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi;
2. Terdapatnya komitmen yang kuat dari pimpinan;
3. Adanya Surat Edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pengawasan urusan pemerintahan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan pengawasan internal.
3. Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM
4. Kurangnya peralatan kerja teknis

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Inspektorat Dacrah Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Belum optimalnya kerjasama/kolaborasi Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan pengawasan internal;
- b. Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai *Consulting, Quality Assurance and Early Warning System*;
- c. Dinamika kebijakan pemerintah.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Inspektorat Dacrah Kota Batam yaitu:

- a. Peraturan dan kebijakan pemerintah penguatan peran Inspektorat;
- b. Kuatnya komitmen pimpinan atas kapabilitas APIP dalam implementasi Pengawasan Intern;
- c. Kuatnya komitmen pimpinan dalam upaya meningkatkan hasil penilaian kinerja dan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB;
- d. Kuatnya komitmen pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja;
- e. Adanya mandatori regulasi yang melandasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Lembaga;
- f. Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM;

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Dacrah Kota Batam antara lain:

1. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah Kota Batam. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi PD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance*. Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.
3. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* sehingga memerlukan komitmen semua pihak terkait. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada PD sebagai mitra audit. Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi perangkat daerah.
4. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah. Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara PPUPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara PPUPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Inspektoral Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Keabsahan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
	Program : Peningkatkan Kualitas Pelayanan Daerah	Batam	Persentase terpenuhinya program urusan Pemerintahan Daerah	100%	39.105.072.973	Program : Peningkatkan Kualitas Pelayanan Daerah	Batam	Persentase terpenuhinya program urusan Pemerintahan Daerah	100%	45.322.302.480	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang sesuai serta dengan tahapan dan waktu	-	-	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang sesuai serta dengan tahapan dan waktu	100%	60.010.000	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.083.000	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.927.000	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	33.700.064.873	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	36.877.383.250	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Cuci dan Tampung ASN	Batam	Jumlah barang yang diterima Cuci dan Tampung ASN	00 Quang, Bulan	31.451.224.173	Sub Kegiatan : Pengadaan Cuci dan Tampung ASN	Batam	Jumlah barang yang diterima Cuci dan Tampung ASN	00 Dokumentasi	30.625.333.230	
	Sub Kegiatan : Perbaikan Cuci dan Tampung ASN	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengujian, Verifikasi Keunggulan SKPD	12 Dokumen	5.249.000	Sub Kegiatan : Perbaikan Cuci dan Tampung ASN	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengujian, Verifikasi Keunggulan SKPD	12 Dokumen	46.441.000	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	2.561.000.000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	2.936.236.000	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Pegawai Dinas Daerah Melalui Kepegawaian	Batam	Jumlah Pagar Pemoran Timas Timas Akibat Kepegawaian	1 Paket	51.000.000	Sub Kegiatan : Pembinaan Pegawai Dinas Daerah Melalui Kepegawaian	Batam	Jumlah Paket Pemoran Timas Timas Akibat Kepegawaian	1 Paket	133.918.000	
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pemerintah Daerah dan Pegawai	Batam	Jumlah Pegawai diabsorpsi tugas dan fungsi yang Mengantar Analisis dan Absorpsi	50 orang	1.500.000.000	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pemerintah Daerah dan Pegawai	Batam	Jumlah Pegawai diabsorpsi tugas dan fungsi yang Mengantar Analisis dan Absorpsi	50 orang	2.782.318.000	

No.	Rencana Awal RKPD						Hasil Analisis Keabsahan				
	Program/Registasi/Sub Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Dadaaktif (Rp. 000)	Program/Registasi/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Informatif (Rp. 000)	Catatan Penting
	Kegiatan : Administrasi Daerah Perangkat Daerah	Batas	Perencanaan Umum Perangkat Daerah	100%	1.680.000.000	Registasi : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batas	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.643.896.800	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Inspeksi, Pengawasan, dan Pengendalian Kualitas	Batas	Jumlah Paket Komitmen Nasional Lelang/Pemilihan Kegiatan Publik yang Dibatalkan	-		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Inspeksi, Pengawasan, dan Pengendalian Kualitas	Utam	Jumlah Paket Komitmen Nasional Lelang/Pemilihan Kegiatan Publik yang Dibatalkan	1 Paket	58.953.000	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan dan Kelengkapan Komite	Batas	Jumlah Paket Pemilihan dan Pelaksanaan komite yang Dibatalkan	5 Paket	300.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelaksanaan Komite	Utam	Jumlah Paket Pemilihan dan Pelaksanaan Komite yang Dibatalkan	5 Paket	352.003.000	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Daerah Logistik	Batas	Jumlah Paket Belanja Logistik yang Dibatalkan	1 Paket	375.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Logistik	Batas	Jumlah Paket Belanja Logistik yang Dibatalkan	4 Paket	-	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengendalian	Batas	Jumlah Paket Belanja Logistik yang Dibatalkan	4 Paket	85.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Logistik	Batas	Jumlah Paket Belanja Logistik yang Dibatalkan	4 Paket	78.451.000	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengendalian	Batas	Jumlah Paket Belanja Logistik yang Dibatalkan	1 Paket	20.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Logistik	Batas	Jumlah Paket Belanja Logistik yang Dibatalkan	1 Paket	23.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengendalian	Batas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Renc. Kinerja dan Konsolidasi RKPD	12 Laporan	1.300.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Renc. Kinerja dan Konsolidasi RKPD	Batas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Renc. Kinerja dan Konsolidasi RKPD	12 Laporan	1.118.252.000	
	Registasi : Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Batas	Persentase Pengadaan Milik Daerah Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	824.947.000	Registasi : Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Batas	Persentase Pengadaan Milik Daerah Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	8.607.866.600	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Batas	Jumlah Paket Mebel yang Dibatalkan	81 Unit	400.202.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Batas	Jumlah Paket Mebel yang Dibatalkan	81 Unit	759.193.100	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Perabotan dan Mebel Lainnya	Batas	Jumlah Unit Perabotan dan Mebel Lainnya yang Dibatalkan	101 Unit	306.705.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Perabotan dan Mebel Lainnya	Batas	Jumlah Unit Perabotan dan Mebel Lainnya yang Dibatalkan	121 Unit	663.444.000	

No.	Rencana Awal RKPD				Hasil Analisis Kelangkaan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Detail Penting
	Sub Kegiatan : Pengisian Baras dan Pasirera Gubung Kamar atau Bangunan Lainnya	Teram	Jumlah Unit Baras dan Pasirera Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Sub Kegiatan : Pengisian Baras dan Pasirera Gubung dan Kamar Lainnya	Teram	Jumlah Unit Baras dan Pasirera Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.015.974.300	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	Batas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	100%	63.061.600	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	Batas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	100%	70.360.800	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kemitraan, Sumber Daya dan Laitak Lainnya	Teram	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kemitraan, Sumber Daya dan Laitak yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kemitraan, Sumber Daya dan Laitak Lainnya	Teram	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kemitraan, Sumber Daya dan Laitak yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kemitraan, Sumber Daya dan Laitak Lainnya	Teram	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kemitraan, Sumber Daya dan Laitak yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kemitraan, Sumber Daya dan Laitak Lainnya	Teram	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kemitraan, Sumber Daya dan Laitak yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	
	Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	Batas	Persentase Penyelenggaraan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah yang terlaksana	100%	337.000.000	Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	Batas	Persentase Penyelenggaraan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah yang terlaksana	100%	336.500.000	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan dan Biaya Penyelenggaraan Lainnya	Teram	Jumlah Kemitraan Penyelenggaraan atau Kemitraan, Biaya Penyelenggaraan dan Biaya Penyelenggaraan Lainnya yang Disediakan dan Diterapkan	1 Unit	2.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan dan Biaya Penyelenggaraan Lainnya	Teram	Jumlah Kemitraan Penyelenggaraan atau Kemitraan, Biaya Penyelenggaraan dan Biaya Penyelenggaraan Lainnya yang Disediakan dan Diterapkan	1 Unit	40.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan dan Biaya Penyelenggaraan Lainnya	Teram	Jumlah Kemitraan Penyelenggaraan atau Kemitraan, Biaya Penyelenggaraan dan Biaya Penyelenggaraan Lainnya yang Disediakan dan Diterapkan	8 Unit	225.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan dan Biaya Penyelenggaraan Lainnya	Teram	Jumlah Kemitraan Penyelenggaraan atau Kemitraan, Biaya Penyelenggaraan dan Biaya Penyelenggaraan Lainnya yang Disediakan dan Diterapkan	8 Unit	234.400.000	

No.	Rancangan Awal RKPD				Realisasi Kinerja						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Catatan Penting
	SUB Kegiatan : Pemeliharaan Perawatan dan Meas Updaten	Batam	Jumlah Keaktifan dan Meas Update yang Dipelihara	95 Juni	70.000.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Perawatan dan Meas Update	Batam	Jumlah Perawatan dan Meas Update yang Dipelihara	95 Juli	61.530.000	
	Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan	Batam	Persentase Rekomendasi temasa pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	100%	1.750.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan	Batam	Persentase Pemecatan Elementa Kapabilitas APF	100%	985.456.000	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Batam	Persentase SKPD yang mematuhi tingkat Rekomendasi temasa pemeriksaan internal dan eksternal	100%	1.300.000.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Batam	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	808.159.800	
	SKD Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Duesas	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemertintah Daerah	15 Laporan	250.000.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Pemertintah Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemertintah Daerah	15 Laporan	405.405.840	
	SKD Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Pemertintah Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kelangka Pemertintah Daerah	12 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kelangka Pemertintah Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kelangka Pemertintah Daerah	12 Laporan	9.300.000	
	SKD Kegiatan : Review Laporan Kinerja	Batam	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Kinerja	19 Laporan	100.000.000	Sub Kegiatan : Review Laporan Kinerja	Batam	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Kinerja	19 Laporan	199.132.000	
	SKD Kegiatan : Review Laporan Keuangan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	1 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan : Review Laporan Keuangan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	1 Laporan	36.800.000	
	SKD Kegiatan : Kegiatan Pengawasan Internal	Batam	Jumlah Keaktifan Pengawasan Internal yang Terencana	1 Keaktifan	700.000.000	Sub Kegiatan : Keaktifan Pengawasan Internal yang Terencana	Batam	Jumlah Keaktifan Pengawasan Internal	1 Keaktifan	125.297.000	
	SKD Kegiatan : Melakukan dan Melakukan Cindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Batam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Tindakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	2 Dokumen	60.000.000	Sub Kegiatan : Melakukan dan Melakukan Cindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Batam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Tindakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	2 Dokumen	52.875.000	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Batam	Persentase SKPD yang tidak terdapat temasa keraguan Negara/ Daerah	100%	430.000.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Batam	Persentase SKPD yang tidak terdapat temasa keraguan Negara/ Daerah	100%	177.296.400	

No.	Rencana Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Costbase Penting
	Sub kegiatan : Pemanganan dan pelayanan administrasi Kantor Daerah	Batam	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Disetujui	1 Tahun	Sub Kegiatan : Pemanganan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Batam	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Disetujui	1 Laporan	50.000.000	50.000.000
	Sub Kegiatan : Pengawasan dengan Laporan Tahunan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Laporan Tahunan	1 Laporan	Sub Kegiatan : Pengawasan dengan Laporan Tahunan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Laporan Tahunan	1 Laporan	12.529.400	
	Program : Pemenuhan Kebijakan, Peningkatan dan Asistensi	Batam	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPKP, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Integritas	100%	Program : Pemenuhan Kebijakan, Peningkatan dan Asistensi	Batam	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPKP, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Integritas		2.861.796.000	
	Kegiatan : Pemenuhan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Batam	Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil pendampingan dan asistensi	100%	Kegiatan : Pemenuhan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Batam	Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil pendampingan dan asistensi	100%	33.089.600	
	Sub Kegiatan : Pemanganan dan pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Batam	Jumlah Permohonan Izin yang Disetujui	100%	Sub Kegiatan : Pemanganan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Batam	Jumlah Permohonan Izin yang Disetujui	100%	30.000.000	30.000.000
	Sub Kegiatan : Pemanganan dan pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Batam	Jumlah Perangko Daerah yang Disetujui	100%	Sub Kegiatan : Pemanganan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Batam	Jumlah Perangko Daerah yang Disetujui	100%	15.000.000	15.000.000
	Program : Asistensi dan Pendampingan	Batam	Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil pendampingan dan asistensi	100%	Program : Asistensi dan Pendampingan	Batam	Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil pendampingan dan asistensi	100%	2.829.711.400	
	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Batam	Jumlah Perangko Daerah yang Disetujui	100%	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Batam	Jumlah Perangko Daerah yang Disetujui	100%	500.000.000	500.000.000

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kelembahan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif (Rp. 000)	Catatan Penting
	Sub Kegiatan : Ambilangpan, Asistensi, Verifikasi, dan Pelatihan Masyarakat Desa	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Disertakan dalam Ambilangpan, Asistensi, Verifikasi, dan Pelatihan Masyarakat Desa	13 Perangkat Daerah	250.000.000	Sub Kegiatan : Ambilangpan, Asistensi, Verifikasi, dan Pelatihan Masyarakat Desa	Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang Disertakan dalam Ambilangpan, Asistensi, Verifikasi, dan Pelatihan Masyarakat Desa	13 Perangkat Daerah	1.204.381.200	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Ambilangpan dan Pemberantasan Korupsi	Batam	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1.000.000.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Pemberantasan Korupsi	Batam	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	551.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyiapan, Asistensi dan Verifikasi Perangkat Integritas	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pelaksanaan, Asistensi dan Verifikasi Perangkat Integritas	17 Perangkat Daerah	350.000.000	Sub Kegiatan : Penyiapan, Asistensi dan Verifikasi Perangkat Integritas	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pelaksanaan, Asistensi dan Verifikasi Perangkat Integritas	17 Perangkat Daerah	185.788.900	
	TOTAL				43.150.073.973					49.169.884.880	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Inspektorat Daerah Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektorat Daerah Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Inspektorat Daerah Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
Nihil					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2026 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang ke-1 yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 dengan visi "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Untuk mencapai visi tersebut dicanangkan 8 misi yang disebut Asta Cita. Salah satu misi dari asta cita tersebut merupakan prioritas nasional dalam hal pengawasan yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

Pembinaan dan Pengawasan secara nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembagian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan adalah sebagai berikut :

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh:

a. Provinsi, dilaksanakan oleh:

1. Menteri, untuk pembinaan umum.
2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis.

b. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a) Pembagian urusan pemerintahan;
- b) Kelembagaan daerah;
- c) Kepegawaian pada perangkat daerah;
- d) Keuangan daerah;
- e) Pembangunan daerah;
- f) Pelayanan publik di daerah;
- g) Kerja sama daerah;
- h) Kebijakan daerah;

- i) Kepala daerah dan DPRD;
- j) Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Pengawasan teknis meliputi:

- a. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, operasi, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.

Selain melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Menteri dan Menteri teknis/kepala Lembaga non kementerian sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam melakukan pengawasan, Gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri teknis dan kepala pemerintahan non kementerian dalam melakukan pengawasan teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Menteri. Dalam pengawasan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pengawasan teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan Menteri teknis/kepala Lembaga pemerintahan non kementerian. Koordinasi dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk revidu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pengawasan dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Independen;
- c. Objektif;
- d. Tidak tumpang tindih antar APIP; dan
- e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan APIP dilakukan pada tahap kegiatan:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah laporan hasil pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Inspektorat Daerah Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021 – 2026 Adapun tujuan dari Inspektorat Daerah adalah: Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator :

Nilai Kapabilitas APIP.

Sasaran 2

Menurunnya tingkat Penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan, dengan indikator:

a. Indeks Manajemen Risiko.

b. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Sasaran 3

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan, dengan indikator:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 [3,313]
2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 [3,400]
3	Menurunnya tingkat penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Indeks Manajemen Risiko	3,225
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,154
4	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	91,77

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025 - 2029 yang dirinci dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-5 yaitu Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Inspektorat Daerah mengusulkan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp.49.169.554.650,- (empat puluh sembilan milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja
 - 4) Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan
 - 5) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - 6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- c. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi
- 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- d. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan
- 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

- 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakirannya Tahun 2027
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode Rekening	Uraian/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (tahun Rencana)			Prakirannya Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
6.01.01	Program : Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Kebijakan RPJMD		76,84	46.322.302.450		78,97	44.991.846.400
		Indeks Pelaksanaan Kinerja/Indikator RPJMD		93,50			94,80	
6.01.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pencapaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang terencana sesuai dengan tahapan dan waktu		100%	60.010.000		100%	55.000.000
6.01.01.2.01.001	Sub Kegiatan : Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	2 Dokumen	20.052.000	APBD	2 Dokumen	20.000.000
6.01.01.2.01.002	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya laporan realisasi kinerja Perangkat Daerah	Batam	3 Dokumen	30.927.000	APBD	3 Dokumen	32.000.000
6.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terintegrasi		100%	36.677.583.050		100%	39.874.900.000
6.01.01.2.02.001	Sub Kegiatan : Pengadaan Oligi dan Tanggapan ASB	Jumlah Orang yang Kerasukan Oligi dan Tanggapan ASB	Batam	90 Orang/bulan	36.648.843.050	DAU, APBD	90 Orang/bulan	37.100.000.000
6.01.01.2.02.002	Sub Kegiatan : Pengadaan Oligi dan Tanggapan ASB	Jumlah Jumlah Penawar/Supplier dan Penjualan/Verifikasi Kerjasama SKPD	Batam	12 Dokumen	45.800.000	APBD	12 Dokumen	74.900.000
6.01.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pencapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terintegrasi		100%	4.956.236.000			3.905.446.400
6.01.01.2.05.001	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaran Umur/Desain Arsitek Kebangsaan/nya	Jumlah Paket Pekerjaan Desain Arsitek dan Kelembagaan	Batam	1 Paket	45.518.000	APBD	1 Paket	
6.01.01.2.05.002	Sub Kegiatan : Penilaian dan Pelaksanaan Pegawai Berprestasi Tinggi dan Tunjangan	Jumlah Pegawai berprestasi Tinggi dan Tunjangan yang Kelembagaan/Kelembagaan dan Kelembagaan	Batam	90 orang	4.782.118.000	APBD	90 orang	2.995.446.400
6.01.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Hukum Perangkat Daerah	Pencapaian Penyediaan Administrasi Hukum Perangkat Daerah		100%	1.643.895.800		100%	1.896.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Terdapat Mula Rencana Tahun 2027	
			Indikasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi (Rencana)
6.01.01.2.05.001	Sub Kegiatan : Pencapaian, pemenuhan insialah larak/Amat sangat bangumish kaur	Jumlah Sub Kegiatan Insialah Larak/Amat sangat bangumish kaur yang dilaksanakan	Dalam	1 Tahun	50.000.000	APBD	1 Tahun	70.000.000
6.01.01.2.05.002	Sub Kegiatan : Pencapaian, pemenuhan dan penguatapan kaur	Jumlah Sub Kegiatan dan penguatapan kaur yang dilaksanakan	Dalam	1 Tahun	350.000.000	APBD	1 Tahun	350.000.000
6.01.01.2.05.003	Sub Kegiatan : Pemeliharaan, Arsitektur kaur	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan yang dilaksanakan	Dalam	1 Tahun	-	APBD	1 Tahun	-
6.01.01.2.05.004	Sub Kegiatan : Pemeliharaan, Arsitektur kaur	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan yang dilaksanakan	Dalam	1 Tahun	75.000.000	APBD	1 Tahun	80.000.000
6.01.01.2.05.005	Sub Kegiatan : Pemeliharaan, Arsitektur kaur	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan yang dilaksanakan	Dalam	1 Tahun	35.000.000	APBD	1 Tahun	37.000.000
6.01.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Seluruh	100%	3.607.866.600	APBD	100%	2.050.000.000
6.01.01.2.07.002	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaran dinas operasional, abs, pengoperasian yang disediakan	Jumlah Unit Kendaran dinas operasional yang disediakan	Dalam	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000
6.01.01.2.07.003	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Kenda	Jumlah Paket Kenda yang disediakan	Dalam	50 Unit	750.000.000	APBD	25 Unit	300.000.000
6.01.01.2.07.004	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Media lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Media lainnya yang disediakan	Dalam	50 Unit	300.000.000	APBD	25 Unit	100.000.000
6.01.01.2.07.005	Sub Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang dan Peralatan Gedung kaur atau bangunan lainnya yang disediakan	Dalam	5 Unit	3.000.000.000	APBD	-	-
6.01.01.2.08	Kegiatan : Penyelenggaraan Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh	100%	70.360.400	-	100%	77.000.000
6.01.01.2.08.001	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penujangan Kaur yang disediakan	Dalam	10 Laporan	50.000.000	APBD	10 Laporan	30.000.000
6.01.01.2.08.002	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penujangan Kaur yang disediakan	Dalam	10 Laporan	50.000.000	APBD	10 Laporan	47.000.000
6.01.01.2.09	Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Seluruh	100%	326.850.000	-	100%	333.500.000

Kode Rekening	Urusan/Disdang Unit/sein Pembentukan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Pabun Keresnra)			Prakiraan Mapa Keresnra Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Penting	Target Capaian Kinerja
6.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pembinaan, Bina Pemeliharaan, dan Bina Kemandirian Arrangement Dinas atau Kemandirian Dinas/Instansi	Jumlah Kemandirian Pemranaga Dinas atau Kemandirian Dinas/Instansi yang Diperbarui dan Sibersikan Spakings	Batam	1 Unit	40.000.000	APEED	1 Unit	50.000.000
6.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pembinaan, Bina Pemeliharaan, Bina dan Kemandirian Dinas Cepat tanggap dan Lapangan	Jumlah Kemandirian Dinas (Pembinaan) serta Sambutan yang Diterbitkan dan Bimbingan Pajak dan Perikanan	Batam	3 Unit	225.440.000	APEED	11 Unit	612.800.000
6.01.01.2.09.0003	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Perbaikan dan Medan Lapangan	Jumlah Perbaikan dan Medan Lapangan yang Dipelihara	Batam	30 Unit	61.330.000	APEED	35 Unit	57.000.000
6.01.01.2.09.0004	Penelitian dan/atau Pelaksanaan Survei dan Pencarian, Galian, Bakuair dan Baukerman Lainnya	Jumlah Survei dan Proses dan Gedung Sambutan serta Pembangunan Lapangan yang Diperbarui, Diterbitkan	Batam	-	-	-	1 Unit	150.000.000
6.01.01.2.09.0005	Penelitian dan/atau Pelaksanaan Survei dan Pencarian, Pengukuran Gedung Sambutan serta Pembangunan Lapangan	Jumlah Survei dan Asumansi, Analitik Gedung, Bakuair dan Bimbingan Lainnya yang Diperbarui, Diterbitkan	Batam	-	-	-	1 Unit	150.000.000
6.01.02	Program : Program Penyelenggaraan Perguruan	Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Kelas dan Kegiatan	Batam	100%	985.456.200	-	100%	1.413.800.000
				100%			100%	
6.01.02.2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Perguruan Internal	Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Kelas dan Kegiatan	Batam	100%	805.180.300	-	100%	1.186.000.000
				100%			100%	
6.01.02.2.01.0001	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kelas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Sementara Daerah	Batam	15 Laporan	101.000.000	APEED	15 Laporan	275.000.000
6.01.02.2.01.0002	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kelas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Sementara Daerah	Batam	1 Laporan	6.300.000	APEED	1 Laporan	165.000.000
6.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kelas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Sementara Daerah	Batam	90 Laporan	100.000.000	APEED	20 Laporan	130.000.000
6.01.02.2.01.0004	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kelas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Sementara Daerah	Batam	2 Laporan	36.800.000	APEED	2 Laporan	100.000.000
6.01.02.2.01.0005	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kelas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Sementara Daerah	Batam	1 Kecepatan	125.240.000	APEED	1 Kecepatan	330.000.000

Kode Rekening	Uraian/Bidang Utusan/Pencapaian Daerah/Program/Kegiatan/Sub-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Prakiraan Meja Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Caratan Penting	TARGET Capaian Kinerja
6.01.02.2.01.0007	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kerja Hasil Pelaksanaan ERK di dan Tidak terak Hasil Pemantauan APP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kerja Hasil Pelaksanaan ERK 27 dan 28 dan Laporan Hasil Pemantauan APP	Bulan	2 Dokumen	32.500.000	APBN	2 Dokumen	38.000.000
6.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Daerah Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu B-1	Bulan	100%	177.296.400		100%	258.500.000
6.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan : Nominasi Pengawasan Kegiatan Bypass/Overseas	Jumlah Laporan Pengawasan Kegiatan Bypass/Overseas yang Diunggah	Bulan	1 Laporan	50.000.000	APBD	1 Laporan	93.000.000
6.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan : Nominasi Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Bulan	4 Laporan	120.500.000	APBD	4 Laporan	165.000.000
6.01.03	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemenuhan komitmen dan urek Indeks Manajemen Risiko		100%	3.961.796.000	APBD	100%	1.887.000.000
				100%			100%	
6.01.03.2.01	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase ERSD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi		100%	82.082.000		100%	132.000.000
				100%			100%	
6.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Utama di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumentasi kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan yang Diunggah	Bulan	1 Rekomendasi	40.500.000	APBN	1 Rekomendasi	55.000.000
6.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Utama di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumentasi kebijakan Teknik di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Diunggah	Bulan	1 Rekomendasi	41.482.000	APBN	1 Rekomendasi	77.000.000
6.01.03.2.02	Kegiatan : Asistensi dan Pendampingan	Persentase ERSD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi		100%	3.809.738.000		100%	1.708.000.000
6.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Utama Pengawasan dan Asistensi Utama Pengawasan dan Asistensi	Jumlah Pengikut Daerah yang Melakukan Pendampingan dan Asistensi di Ruang Penyelenggaraan Daerah	Bulan	45 Pengikut Daerah	607.440.000	APBD	45 Pengikut Daerah	545.000.000
6.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, dan Fasilitas Rekomendasi	Jumlah Pengikut Daerah yang Melakukan Pendampingan, Asistensi, dan Fasilitas Rekomendasi	Bulan	45 Pengikut Daerah	1.204.300.000	APBD	45 Pengikut Daerah	530.000.000
6.01.03.2.02.0005	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Anggaran dan Pembertonjolan Kerja	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Anggaran dan Pembertonjolan Kerja	Bulan	3 Kegiatan	55.000.000	APBN	3 Kegiatan	825.000.000

Kode Rekening	Urusan/Didang Urusan/Perencanaan/Isu Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rencana)
5.01.03.2.02.0004	Suho Kegiatan : Peningkatan Asistensi dan Verifikasi Berkeadilan Integrasi	Jumlah Tim/inspeksi Daerah yang Dilakukan Penyusunan, Assessment dan Verifikasi Keagamaan Berkeadilan	Bulan	17 Peningkat Duaah	146.738.500	APBD	17 Peningkat Duaah	145.000.000
TOTAL					49.169.554.650			48.242.346.400

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kota Batam pada perencanaan Tahun 2026 merupakan tahun ke-2 dalam Renstra Tahun 2025 - 2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Wali Kota, Inspektorat Daerah Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dengan 34 (tiga puluh empat) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

NO	KODE	LUASAN/BIKANG LUASAN PROGRAM / DITUCHEM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INFORMASI PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANJUR PERIODE REKORD OPD	REALISASI CAPAIAN REKORD TALUN TULUN TALUN TULUN	PEKERJAAN CAPAIAN TARUHI / KENJA OPD TARIK 3225	CAPAIAN KINERJA DAN KEMANGKUKAN PERFORMAN				KELUMPUKAN SASARAN	PACU MUNDUR TAHUN 2022		PERSINGKATAN PENCANUCUN JAWAB		
							TARGET 2022	PACU INDIKATOR (RP)	LOKASI	SUMBER DATA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PACU INDIKATOR (RP)
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Aktivitas dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang Sesuai				100%	2.205.323.500,00		STANDARISASI AS. 100-100 (KAS)	4. Meningkatkan Efisiensi Efektifitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100				
6.01.01.2.05		Pelayanan Jasa Kesehatan Luaran Masyarakat Cakupan	Pelayanan kesehatan seseorang yang sesuai				100%	75.360.000,00			Meningkatkan Efisiensi Efektifitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat			60.504.000,00		
6.01.01.2.05.002		Perawatan, Jasa Kesehatan, Rujukan, dan Lain-lain					100%	22.249.000,00		PT PRAKARYA ASRI LINDAH PRILI				22.249.000,00		
6.01.01.2.05.002.01		Perawatan, Jasa Kesehatan, Rujukan, dan Lain-lain					100%	22.249.000,00		Sum Baran, Sum A, Sum M, Sum R, Sum U				22.249.000,00		

MD	KDC	LELUAS/LEBANG LELUAS PROGRAM / OUTCOME/REGULASI / SUB REGULASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI/HA OPD	REALISASI CAPAIAN SISWA OPD TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET REALIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEMANGSA PEMBERUKAN						KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN MELALUI RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENGURUS/UNIT JAWAB	
							TARGET 2023	PAGU BOKIKAT (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROFILAS RESIDUAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.01.1	2.21.0000	Perbaikan Tambak dan Mudi Lahan				0.121	200.410.000,00	Kota Batu, Surobo, Karamba, Surobo, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kemampuan publik dalam mengelola sumber daya alam serta meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.	-	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sukoharjo	16	200.250.000,00	KABUPATEN DAERAH	
2	6.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PERKOTAAN	Aktivitas Perencanaan dan Monev Lahan yang Berkualitas				30.121	0.050.000,00	Kota Batu, Surobo, Karamba, Surobo, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kemampuan publik dalam mengelola sumber daya alam serta meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.	-	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sukoharjo		70.200.000,00	REKORDEKAT DAERAH	
	6.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PERKOTAAN	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				100.20	400.000.000,00								1.000.000.000,00	
	6.01.02.01	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				100.20	400.000.000,00								1.000.000.000,00	REKORDEKAT DAERAH
6.01.02.01.01		Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman														

NO	KODE	LURUS / BIDANG LURUS (PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN) SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERKURSI HOKUSIA OPD	REALISASI CAPAIAN PERKURSI OPD TAHUN 2024	HAKIKAH CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	GAPAIAN KINETIK DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PENCANAAN BAKU RENCANA TAHUN 2025		PERINGKAT DAERAH PENANGKOH JAWAB	
							MORDET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		14	15	16		17
											NASIONAL	DAERAH					
1	5.01.22.27.1000		ANALISA LAPORAN PELAKU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JAWAB	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.01.22.27.1000	Penyusunan Laporan Penelitian Dasar	ANALISA LAPORAN PELAKU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JAWAB				19 Agustus	600.000.000,00	KOTA SURABAYA, SURABAYA, KANTORAN SURABAYA SURABAYA	REKONSTRUKSI ASLI (DAN RAKIT) (PAGU)		Mencakup: 1. Menentukan lokasi penelitian 2. Melakukan studi pustaka 3. Melakukan pengamatan 4. Melakukan wawancara 5. Melakukan analisis data 6. Menyusun laporan penelitian	Penelitian Dasar Penalaran Kritis			200.000.000,00	PEMERINTAH DAERAH
	5.01.22.27.1000	Penyusunan Laporan	ANALISA LAPORAN PELAKU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JAWAB				1 Agustus	2.000.000,00	KOTA SURABAYA, SURABAYA, KANTORAN SURABAYA SURABAYA	REKONSTRUKSI ASLI (DAN RAKIT) (PAGU)		Mencakup: 1. Menentukan lokasi penelitian 2. Melakukan studi pustaka 3. Melakukan pengamatan 4. Melakukan wawancara 5. Melakukan analisis data 6. Menyusun laporan penelitian	Penelitian Dasar Penalaran Kritis			200.000.000,00	PEMERINTAH DAERAH
	5.01.22.27.1000	Penyusunan Laporan	ANALISA LAPORAN PELAKU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JAWAB				27 Agustus	10.000.000,00	KOTA SURABAYA, SURABAYA, KANTORAN SURABAYA SURABAYA	REKONSTRUKSI ASLI (DAN RAKIT) (PAGU)		Mencakup: 1. Menentukan lokasi penelitian 2. Melakukan studi pustaka 3. Melakukan pengamatan 4. Melakukan wawancara 5. Melakukan analisis data 6. Menyusun laporan penelitian	Penelitian Dasar Penalaran Kritis			100.000.000,00	PEMERINTAH DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KAJI HAKI HAKI PERKOTA RESISTIVA OPD	REALISASI CAPAIAN RESISTIVA TAHUN 2024	PRAKTIK CAPAIAN TARGET RESISTIVA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINETIKA DAN KEMERAGAAN PERSEKUTUAN						KELOMPOK SASARAN	PINDAIAN BLOK RENCANA TAHUN 2027		KERANGKAT DAERAH PEMERINTAH LOKAL
							TARGET 2026	PASU INDIKATOR (R)	LOKASI	SUMBER DATA	PRERIAS NASIONAL	PRERIAS DAERAH		TARGET	PASU KINERJA (R)	
1	3	2	Aktivitas Layanan / Sub Dinas Layanan Masyarakat	6	8	7	1. Layanan	30.434.000,00	10	11	Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat dalam menggunakan layanan digital pemerintah	14	15	16	85.222.000,00	17
2.01.27.27-0000			Kepj Bina Pengawasan Mandiri													
			Aktivitas Koordinasi Pengawasan Mandiri pada Timbunan				1. Koordinasi	150.347.000,00	Raja Rahan, Serang, Kabupaten Serang dan Cileas	PERKAWINAN ASU DAERAH (PAC)	Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat dalam menggunakan layanan digital pemerintah				758.222.000,00	
6.2-06.2.01-0002			Worship dan ibadah Terasa Lela Halal Pennebunan BSK RI dan Terasa Lela Halal Pura Pennebunan JPP				2. Dukungan	22.476.000,00	Raja Rahan, Serang, Kabupaten Serang dan Cileas	PERKAWINAN ASU DAERAH (PAC)	Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat dalam menggunakan layanan digital pemerintah				400.222.000,00	

NO	KODE	URAIAN/INDICATOR PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REKORD PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE KEHATRA DINO	REALISASI CAPAIAN KEMUDA KEMUDA TAHUN 2024	REKORDEK CAPAIAN TARGET BERSAMA DINDA 2024	CAPAIAN KINERJA DAN MELAKUKA PERFORMAN					PRAKTIS MAJU PERUMAH TAHUN 2024		PEKERJAAN BERSAMA PERUMAH KEMUDA	
							LOKASI	SUMBER DANA	PESERTAS		KELMPOK SASARAN	TARGET	PACU INDIKATIF (RPI)		
									NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2.01.01.02	Program Adaptasi Iklim (PAAI) Kabupaten Argungun dan Kabupaten Pangasinan	Program Monev, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (MEP)	-			100%	8	50	11	12	13	14	15	
	6.2.00.01.0201	Penyusunan Kebijakan Energi Argungun						32.222.000,00						27.750.000,00	17
			1. Analisis Monev dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan					16.222.000,00	Desa, Kecamatan, Kabupaten Pangasinan	PENGKUALIFIKASIAN (PNU)					
	6.01.02.01.01000	Penyusunan Kebijakan Energi Pangasinan						15.4.4.000,00	Kota, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pangasinan	PENGKUALIFIKASIAN (PNU)					
			1. Analisis Monev dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan												

NO	KODE	URAIAN/URAIAN URAIAN PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE PENYUSUNAN OPO	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPO TAHUN 2024	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEMUNGKINAN PENYUSUNAN						KELOMPOK BERKAWAN	PEKERJAAN VAJIB PEKERJAAN TAHUN 2024		PETAINGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROJEKSI NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	6.2.00.0.01	Pendidikan dan Kesehatan	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	-	100%	8	10	11	12	13	14	15	16	17
6.2.00.0.01.001		Pendidikan dan Kesehatan	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	-	100%	8.332.712.000,00							10.000.000,00	KORPORASI DAERAH
6.2.00.0.01.001.001		Pendidikan dan Kesehatan	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	-	45 juta per daerah	337.475.000,00	Riau Riau Sumatera Utara Sumatera Barat	PERKAWAN ASLI (KAWAN PPSU)	100% (KAWAN PPSU)				100.000.000,00	KORPORASI DAERAH
6.2.00.0.01.001.001.001		Pendidikan dan Kesehatan	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	-	50 juta per daerah	1.204.251.000,00	Riau Riau Sumatera Utara Sumatera Barat	PERKAWAN ASLI (KAWAN PPSU)	100% (KAWAN PPSU)				100.000.000,00	KORPORASI DAERAH
6.2.00.0.01.001.001.001.001		Pendidikan dan Kesehatan	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	-										

NO	KODE	URUSAN/URAIAN URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KELOMPOK/INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARUJAT AKHIR PERIODE BERTAKWA CPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA CPD TAHUN 2021	PRAKTISAN CAPAIAN TARGET RENCANA CPD TAHUN 2021	GAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PERENCANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTISAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		PEMANGKAT DIBERAH PEMERINTAH DAERAH	
							TARUJAT 2021	PACU INDIKATOR (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARUJAT 2021	PACU INDIKATOR (RP)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Akses layanan kesehatan, lingkungan hidup, dan kualitas pelayanan publik yang terjangkau dan merata				2 kegiatan	Rp. 200.000,00	Kota Ternate, Seram, Kepulauan Seram Maluku	PKK (KORPORASI) ASLI (KORPORASI) (P-2)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)
5.01.02.02.00004			Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik				17 kegiatan	Rp. 700.000,00	Kota Ternate, Seram, Kepulauan Seram Maluku	PKK (KORPORASI) ASLI (KORPORASI) (P-2)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)
							J U M L A H										
								46.384.654.000,00								46.384.654.000,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

5.1 Catatan Penting

Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029.

Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 3 program, 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam, maka seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam dalam pelayanan pengawasan urusan pemerintahan

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD